



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
NOMOR W.2-9927.PR.01.01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

6. Peraturan...

- 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2020-2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
 2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 3. Menyusun dan menetapkan laporan kinerja; dan
 4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini Kantor Wilayah akan melaksanakan:
1. Melakukan review atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara bulanan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 7 Juni 2021
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SS 1	Terbentuknya perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum			
1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk	3 RUU	
2	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	Jumlah pasal yang dikabulkan dalam pengujian di MK dibagi Total jumlah pasal dalam Undang-Undang Prakarsa Pemerintahan sudah putus dikali 100 %	5 %	
P12	Program Pembinaan Hukum Nasional			BPHN
SP12-01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi	
2	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU	
3	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 JDIH	
4	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	75 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar Hukum	
5	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500 Orang	
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			
SK 6	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
1	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	348 Orang	
2	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	47 Kegiatan	
3	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	
4	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	
5	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
	6	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	
P04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM				Balitbang Hukum dan HAM
SP02-01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset				
	1	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	60 %	
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah				
SK 2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia				
	1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	60 %	
SK 3	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah				
	1	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan	1 Buku	
P06	Program Pembentukan Hukum				Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
SP06-01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas				
	1	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan target penyusunan RPUU dikalikan 100 %	80 %	
	2	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200 Orang	
	3	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	Jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	80 %	
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah				
SK 7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah				
	1	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan harmonisasi PUU	27 Raperda	
SK 8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan				
	1	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	31 Orang	
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat				
	1	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM	3,51 Indeks	
	2	Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa	
	3	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah dilindaklanjuti dibagi jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang dilindaklanjuti dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali 100%	20 Dokumen	
P07	Program Administrasi Hukum Umum				Ditjen AHU

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SP07-01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum			
	1 Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Jumlah layanan administrasi hukum umum yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%	7.133.611 Dokumen	
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			
SK 11	Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah			
	1 Persentase peningkatan PNBP Administasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%	5 %	
SK 12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD			
	1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan oelaksanaan iabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	80 %	
SK 13	Terwujudnya layanan BHP yang berkepastian hukum			
	1 Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan Balai Harta Peninaaan masuk dikali 100%	80 %	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan			Ditjen Pemasyarakatan
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
	1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan dengan metode survey eksternal	90%	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 12	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah			
	1 Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilawah sesuai standar	Jumlah UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar dibagi Jumlah UPT Pemasyarakatan dikali 100%	90 %	
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
	1 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%	90 %	
	2 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana/ Tahanan dikali 100%	90 %	
	3 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%	90 %	
	4 Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	-	
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
	1 Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar dibagi Jumlah Tahanan dikali 100%	90 %	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
1	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	Jumlah basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar dibagi Jumlah Basan baran dikali 100%	90 %	
SK 17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 Layanan	
3	Tersedianya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	Tersedianya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	1 Layanan	
4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Masyarakat, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.			
1	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	Jumlah rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dibagi jumlah tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dikali 100%	85 %	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat			Ditjen Masyarakat
SP08-02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat Menuju Manusia Mandiri			
1	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat yang Berdaya Guna Setelah Bebas	Jumlah Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat yang Berdaya Guna Setelah Bebas dibagi Jumlah Klien dikali 100%	15,2 %	
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah			
SK 4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar			
1	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%	90 %	
2	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%	90 %	
3	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantive dan administrative untuk diusulkan mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP dikali 100%	90 %	
4	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%	90 %	
SK 5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar			
1	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%	90 %	
2	Persentase klien yang mendapatkan Pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	Jumlah Klien yang mendapatkan pembimbingan dan pengawasan sesuai standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%	90 %	
3	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dibagi Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikali 100%	90 %	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SK 6	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
	1 Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah Anak dikali 100%	90 %	
	2 Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi Jumlah Anak dikali 100%	90 %	
SP08-03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat			
	1 Menurunnya Persentase Residivis	Jumlah Residivis pada Tahun berjalan dibagi Jumlah Narapidana	9,8 %	
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah			
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
	1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	90 %	
	2 Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.	90 %	
	3 Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	Jumlah Gangguan Keamanan yang Ditindak dan Ditanggulangi dibagi Jumlah Gangguan Keamanan dikali 100%	90 %	
P10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			Ditjen Imigrasi
SP10-01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan keimigrasian dengan metode survey eksternal	7,3 Indeks	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian. Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
SK 8	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
	1 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	-	
SK 9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian			
	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Survei tingkat kualitas layanan keimigrasian pada satker keimigrasian	2 %	
SK 10	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi			
	1 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	-	
SK 11	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker			
	1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan dengan metode survey	3 Indeks	
SK 12	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	1 Jumlah Layanan Internal Overhead	Jumlah Layanan Internal Overhead	1 Layanan	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Perkantoran			
	1 Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SK 14	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker				
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	
SP10-02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian				
	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	Perhitungan target jumlah pelanggaran tahun sebelumnya / dibagi jumlah pelanggaran di tahun sekarang x 100%	2 %	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian				
	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya / jumlah pelanggaran di tahun sekarang x 100%	2 %	
SK 4	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi				
	1	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	-	
SK 5	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi				
	1	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	-	
SK 6	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan				
	1	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	-	
P09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual				Ditjen Kekayaan Intelektual
SP09-01	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia				
	1	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali 100%	2 %	
	2	Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi	Selisih jumlah produk KI yang dilindungi tahun berjalan dengan jumlah produk KI tahun sebelumnya dibagi jumlah produk KI tahun sebelumnya dikali 100%	5 %	
	3	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Selisih jumlah pengaduan pelanggaran KI di tahun sebelumnya dengan jumlah pengaduan pelanggaran KI di tahun berjalan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran KI di tahun sebelumnya dikali 100%	5 %	
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				
SK 7	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM				
	1	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di tahun berjalan	80 Jumlah Permohonan	
	2	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah stakeholder penerima diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah di tahun berjalan	30 Stakeholder	
SS4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM				
	1	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	(Jumlah Institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM ditambah jumlah institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM)	150 Institusi	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
	2	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang Peduli HAM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kabupaten.Kota Peduli HAM pada Tahun 2020	250 Kab/Kota	
	3	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan sejumlah 240 kasus dikali 100%	100 %	
P11	Program Pemajuan HAM				Ditjen HAM
SP11-01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM				
	1	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM x 100%	70 %	
	2	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM' x 100%	15 %	
	3	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh Kab/Kota) dikali 100%	10 %	
	4	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan (sejumlah 240 kasus) dikali 100%	50 %	
	5	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM) x 100%	75 %	
	6	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1 Rekomendasi	
	7	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100%)	60 %	
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah				
SK 9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM				
	1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	8 Instansi Pemerintah	
	2	Jumlah kab/kota peduli HAM	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM	33 Kab/Kota	
	3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
SK 10	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah				
	1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi pelindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	
P09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual				Ditjen Kekayaan Intelektual
SP02-02	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas				
	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%	80 %	
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SK 3	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal			
	1 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah kegiatan pencegahan dan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah di tahun berjalan	2 Lokus	
SS5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI			
	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh MENPAN RB	95 %	
	2 Indeks Integritas	Nilai survey persepsi integritas Kemenkumham	3,8 Indeks	
P01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM			Sekretariat Jenderal
SP01-01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			
	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Survey internal	7,1 Indeks	
	2 Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh MENPAN RB	85 %	
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian oleh MENPAN RB	85 %	
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
SK 7	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.			
	1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran satker dibawah kanwil yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	1 Dokumen	
	2 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	Menghitung jumlah pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	1 Layanan	
	3 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	Menghitung jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan	
	4 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	Menghitung jumlah asset BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	1 Layanan	
	5 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.	Menghitung jumlah layanan persuratan melalui sumaker yang ditindaklanjuti.	1 Layanan	
	6 Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar	Menghitung jumlah berita yang terpublikasikan kepada masyarakat secara cepat dan benar	1 Layanan	
	7 Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan	Menghitung jumlah sarana dan prasarana di Kantor Wilayah yang sesuai kebutuhan	1 Layanan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA TAHUN 2021-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA							
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan						
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Dilakukan survey kepuasan pembina terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan	3,1	3,15	3,2	3,25	1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas						Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan target penyusunan RPUU dikalikan 100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	Jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah							
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah						Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	Jumlah fasilitasi perancangan perda dibagi dengan permohonan dikalikan 100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan						Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	
SP3B 1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum						Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan peninjauan analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan dibagi dengan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya x 100%	20 %	20 %	20 %	20 %	
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 x 100%	25 %	20 %	15 %	10 %	
5256 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah						Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM						
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	65 %	70 %	75 %	80 %	
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	(Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%	35 %	40 %	45 %	50 %	
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM						Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	(Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh Kab/Kota) dikali 100%	15 %	20 %	25 %	30 %	
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait dibagi jumlah surat rekomendasi yang disampaikan Ditjen HAM ke instansi terkait) dikali 100%.	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM) x 100%	75 %	75 %	75 %	100 %	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM						Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	
	Jumlah kab/kota peduli HAM	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah						Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik						
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen AHU, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,15	3,2	3,25	3,3	1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
SP2A 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum						Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Jumlah layanan administrasi hukum umum yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%	84 %	86 %	88 %	90 %	
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum						1. Kepala Kantor Wilayah 2. Ketua BHP

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNPB tahun berjalan dikurang jumlah PNPB tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNPB tahun sebelumnya, dikali 100%	5 %	5 %	5 %	5 %	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepasialan hukum	Jumlah permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan Balai Harta Peninggalan masuk dikali 100%	82 %	84 %	86 %	88 %	Ketua BHP
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD						Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	82 %	84 %	86 %	88 %	
SP2B 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas						Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	Akan dilaksanakan oleh Balitbangkumham dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Balitbangkumham melalui aplikasi survey.balibangkumham.go.id	75	80	85	90	
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	Nilai rata-rata dari penilaian pelaksanaan seluruh kerja sama dengan komponen yaitu : disepakati, dilaksanakan, memberikan manfaat kedua belah pihak, dan berkelanjutan.	75	80	85	90	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	Nilai indeks kepuasan pengguna layanan IT Pemasarakatan didapat melalui survey kepuasan pengguna layanan IT Pemasarakatan	75	80	85	90	
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Akan dilakukan melalui penilaian parameter derajat kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan	73	78	83	88	
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah						Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak, dikali 100%	71 %	75 %	80 %	85 %	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak, dikali 100%	92 %	93 %	94 %	95 %	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui), dikali 100%	95 %	96 %	97 %	98 %	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental, dikali 100%	60 %	70 %	80 %	90 %	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana lansia, dikali 100%	75 %	80 %	85 %	90 %	
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas), dikali 100%	75 %	80 %	85 %	90 %	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan virusnya}}{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan TB positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah narapidana dengan TB positif}} \times 100\%$ Keterangan : A = Keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan penanganan narapidana dengan TB Positif	60 %	70 %	80 %	90 %	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Jumlah perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi, dikali 100%	23 %	25 %	27 %	29 %	
SP2C 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian						Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,15	3,20	3,25	3,30	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah							
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah						Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00	3,15	3,20	3,25	3,30	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00	3,11	3,12	3,13	3,14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00	3,11	3,12	3,13	3,14	
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia						Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,30	3,32	3,34	3,36	
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM						Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Jumlah layanan KI yang difasilitasi kantor wilayah	84 Permohonan	85 Permohonan	86 Permohonan	87 Permohonan	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah berdasarkan lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	
SK 9	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal						Kepala Kantor Wilayah
	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah penanganan aduan KI tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran KI tahun berjalan, dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.						
	Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna	Menghitung persentase klien masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya guna adalah dengan membagi jumlah klien produktif dibagi dengan jumlah klien dikali 100%	40 %	45 %	50 %	55 %	Ditjen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	Menghitung benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya (nilainya) adalah dengan membagi jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi dengan jumlah benda sitaan yang telah inkrah dikali 100%	60 %	70 %	80 %	90 %	Ditjen PAS
	Persentase menurunnya residivis	Menghitung persentase residivis adalah dengan menghitung jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidananya dalam kurun waktu 2 tahun setelah dinyatakan dibagi dengan jumlah narapidana yang telah bebas dalam kurun waktu 2 tahun dikali 100%	1 %	1 %	1 %	1 %	Ditjen PAS
	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	Menghitung persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan adalah mengurangi jumlah tahanan dengan jumlah tahanan overstaying Hasil pengurangan dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%	70 %	80 %	90 %	100 %	Ditjen PAS
SP2B 2	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Masyarakatan						Direktur Jenderal Masyarakatan
	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	Menghitung indeks keberhasilan pembinaan narapidana adalah dengan menjumlahkan setiap variabel keberhasilan pentahapan pembinaan dibagi dengan jumlah variabel, dikali 100%	49	53	56	60	
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	Menghitung Indeks Pemenuhan Hak Narapidana Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pemenuhan Hak Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%	87,5	90	92,5	95	
	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakatan	Menghitung Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Keberhasilan Pembimbingan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.	40	50	60	70	
	Indeks Pembinaan Khusus Anak	Menghitung Indeks Pengentasan Anak Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pengentasan Anak Dibagi dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.	60	68	74	84	
	Indeks Pengelolaan Basan Baran	Menghitung Indeks Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pengelolaan Basan Baran Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.	60	70	80	90	
	Indeks Pelayanan Tahanan	Menghitung Indeks Pelayanan Tahanan Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Pelayanan Tahanan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.	60	70	80	90	
5252 - Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah							
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakatan yang Berkualitas di Wilayah						Kepala Divisi Masyarakatan
	Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Menghitung Masyarakatan Di Wilayah Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel Penyelenggaraan Masyarakatan Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.	80	81	82	83	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
		$IPPW = \frac{(A+B+C+D+E+F+G+H+I)}{9} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan D = Indeks Pelayanan Tahanan E = Indeks Pengelolaan Basan Baran F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana H = Indeks Pembinaan Khusus Anak I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</p>					
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar						Kepala Rutan
	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	Jumlah Tahanan Overstaying Dibagi Dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%	70 %	80 %	90 %	100 %	
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Dibagi Jumlah Tahanan Dikali 100%	70 %	80 %	90 %	100 %	
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Dibagi Jumlah Pemohon Bantuan Hukum Dikali 100%	70 %	80 %	90 %	100 %	
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi						Kepala Lapas
	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian Dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	60 %	65 %	70 %	75 %	
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	97 %	98 %	99 %	100 %	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	75 %	80 %	85 %	90 %	
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah Narapidana Yang Tidak Memiliki Latar belakang Pendidikan Formal Dikali 100%	75 %	80 %	85 %	90 %	
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin Dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	13 %	15 %	17 %	19 %	
	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	25 %	28 %	31 %	34 %	
	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	Jumlah Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif Dibagi Jumlah Narapidana Yang Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100%	62 %	67 %	72 %	77 %	
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar						Kepala Rupbasan

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi jumlah seluruh benda sitaan dan barang rampasan dikali 100%	60 %	70 %	80 %	90 %	
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Eksekusi Dibagi Dengan Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap) Dikali 100%	40 %	60 %	80 %	100 %	
SK 19	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar						Kepala Bapas
	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	Jumlah Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga Dibagi Jumlah Klien Usia Produktif Dikali 100%	40 %	50 %	60 %	70 %	
	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Dibagi Jumlah Pendampingan Anak Dikali 100%	50 %	55 %	60 %	65 %	
	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	Jumlah Klien Anak Yang Melanjutkan Pendidikan Di Dibagi Jumlah Klien Anak Dikali 100%	25 %	30 %	35 %	40 %	
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar						Kepala LPKA
	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	Jumlah Anak Yang Terampil Dibagi Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan Dikali 100%	70 %	75 %	80 %	85 %	
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah Anak Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	Jumlah Anak Yang Meperoleh Pengasuhan Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	70 %	80 %	90 %	100 %	
	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	70 %	80 %	90 %	100 %	
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI						
	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Berdasarkan Hasil Penilaian Instrumen Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85	Ditjen PAS
	Indeks pengamanan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,11	3,12	3,13,	3,14	Ditjen Imigrasi
SP2B 3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib						Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Berdasarkan Hasil Penilaian Instrument Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85	
5252 -	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah						
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar						Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%	75 %	80 %	85 %	90 %	
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.	60 %	70 %	80 %	90 %	
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib dikali 100%	75 %	80 %	85 %	90 %	
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	60 %	70 %	80 %	90 %	

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
SP2C 2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian						Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,11	3,12	3,13	3,14	
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat						
	Indeks kepuasan masyarakat alas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	BPHN
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	70 %	70 %	70 %	70 %	BPHN
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi x 100%	77 %	81 %	81 %	81 %	BPHN
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi x 100%	79 %	80 %	80 %	80 %	BPHN
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	BPHN
SP3B 2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum						Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat alas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi x 100%	77 %	81 %	81 %	81 %	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi x 100%	79 %	80 %	80 %	80 %	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah							
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah						Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi x 100%	77 %	81 %	81 %	81 %	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi x 100%	79 %	80 %	80 %	80 %	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	70 %	70 %	70 %	70 %	
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100%	20 %	20 %	20 %	20 %	
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien						
	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian Menpan RB	82	85	87	90	Sekretariat Jenderal

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Menpan RB	88	90	92	94	Sekretariat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi	$\frac{\sum \text{sitasi tahun sekarang (n)} - \sum \text{sitasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\sum \text{sitasi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	20 %	20 %	20 %	20 %	Balitbang Hukum dan HAM
SP1A 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI						Sekretaris Jenderal
	Persentase Saluan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah Saluan Kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh Satuan Kerja dikali 100%	92 %	93 %	94 %	95 %	
	Persentase Saluan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Jumlah Satuan Kerja yang mendapat nilai capaian RB minimal 90 dibagi seluruh Satuan Kerja dikali 100%	92 %	93 %	94 %	95 %	
1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM							
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien						Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Survey internal yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3,1	3,1	3,1	3,1	
6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP							
SK 11	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP						Ketua BHP
	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	Rata-rata dari penjumlahan (Jumlah dokumen perencanaan anggaran dibagi jumlah target dokumen perencanaan anggaran dikali 100%), (jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah target laporan keuangan dikali 100%), dan (jumlah pemberitaan positif di media dibagi jumlah target pemberitaan di media dikali 100%)	90 %	90 %	90 %	90 %	
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan							
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker						Kepala Satker Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Menghitung jumlah dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Menghitung Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	Menghitung data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Menghitung Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	Menghitung jumlah layanan perkantoran yang dilakukan UPT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	Jumlah Kendaraan Bermotor	Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT	-	-	-	-	
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Menghitung jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan pemeliharaan/penaadaan oleh UPT	-	-	-	-	
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Menghitung Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT	-	-	-	-	
	Jumlah Gedung/Bangunan	Menghitung Jumlah Gedung/Bangunan yang dilakukan pemeliharaan/pembangunan oleh UPT	-	-	-	-	
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi							
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah						Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00	3,15	3,20	3,25	3,30	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00	3,11	3,12	3,13	3,14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4,00	3,11	3,12	3,13	3,14	
SP1A 2	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel						
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP	
SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset						Kepala Balitbang Hukum dan HAM
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70 %	80 %	80 %	80 %	
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{sitasi tahun sekarang (n)} - \sum \text{sitasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\sum \text{sitasi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	20 %	20 %	20 %	20 %	
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah							
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia						Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70 %	80 %	80 %	80 %	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi

NIP 196312071987031001